
Internal Control System : Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Laily Chudriyah AM¹, Yulinartati², Suwarno¹

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: lailialfi19@gmail.com¹

Article History:

Received: 10 Juni 2022

Revised: 18 Juni 2022

Accepted: 19 Juni 2022

Keywords: Fraud, Village Finance, Internal Control System

***Abstract:** This study aims to determine whether or not fraud occurs in financial management in Karangsono village and how the internal control system exists in the village. The research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. The subjects in this study were conducted by interviewing 5 village officials and observing the object under study, namely in Karangsono Village. The technique used in this research is starting from data collection, data presentation, and data retrieval. The results of this study are internal control, apparatus competence, good individual morality, which greatly influences the prevention of fraud that will occur in village financial management.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa ialah perihal sensitif yang kerap kali menyesatkan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengannya. Perihal ini tidak terlepas dari tingkatan pemerintahan desa yang memanglah mempunyai tingkatan kecurangan yang lumayan besar. Tipe kecurangan yang kerap terjalin di tingkatan desa antara lain pemakaian kas desa secara illegal, mark up serta kick back buat pengadaan benda ataupun jasa. Kecurangan yang lain semacam pemakaian peninggalan desa yang digunakan buat kepentingan individu aparat desa yang tidak legal serta terdapatnya pungutan liar dikala membagikan pelayanan kepada warga.

Pasal 13 UU 2003, Pasal Ketenagakerjaan. Keahlian kerja setiap individu secara tepat mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kerja, dengan menggunakan standar yang ditetapkan atau diterapkan. Tingginya kapabilitas instansi pemerintah dengan sistem pengendalian internal yang canggih dapat membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah serta mencegah terjadinya kecurangan dan kecurangan. Kapabilitas dan kapabilitas aparatur perangkat desa (SDM) dapat dilihat dari segi pendidikan, namun dapat menjadi kendala dalam mengelola keuangan desa dan dapat menimbulkan kecurangan nantinya. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa. (Basiruddin, 2014).

Sugiman, (2018) melaporkan kalau desa bisa dijadikan selaku unit organisasi pemerintah yang berhadapan secara langsung terhadap warga dengan seluruh kepentingan ataupun kebutuhan yang memiliki peranan strategis. Umumnya kemajuan negeri ditetapkan oleh desa sebab tidak terdapat suatu negeri yang dapat maju tanpa terdapatnya provinsi yang turut dan maju, tidak

terdapat provinsi yang dapat maju dengan terdapatnya kabupaten yang turut dan maju, serta tidak bisa jadi terdapat suatu kabupaten yang dapat maju tanpa terdapatnya desa ataupun kelurahan yang turut dan maju. Suatu desa mempunyai batasan batasan sesuatu daerah tertentu serta pula mempunyai kekuasaan hukum dikepalai oleh seseorang kepala desa. Sehingga desa bisa dikatakan selaku sesuatu hasil antara aktivitas sekelompok manusia serta adanya lingkungan. Hasil tersebut ialah sesuatu bentuk yang ditimbulkan terdapatnya faktor sosial, ekonomi, politik serta kultural yang silih berhubungan. Penelitian ini dilakukan di desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember untuk melihat bagaimana kecenderungan *Fraud*. Mengingat semakin banyaknya kasus penyalahgunaan dana pada kalangan pemerintah desa. Selain itu, juga terjadi adanya permasalahan mengenai kemampuan aparatur desa dalam mengelola sistem keuangan. Setiap tahun pihak yang bersangkutan pada bagian keuangan desa sering mengalami pergantian. Sehingga perlu adanya adaptasi dalam mengoperasikan sistem keuangan dan perlu adanya pelatihan penggunaan sistem.

Sistem pengendalian internal dapat berpengaruh langsung terhadap adanya *Good Governance* nantinya dapat berimplikasi terhadap pencegahan *Fraud*. Namun, biasanya sistem pengendalian internal tidak luput dari adanya kelemahan, kelemahan ini nantinya dimanfaatkan oleh oknum para pelaku kecurangan. Jika suatu kelemahan pada sistem dapat didukung oleh adanya moralitas aparatur yang baik maka untuk segala kecurangan nantinya bisa dicegah. Moralitas aparatur pemerintah bahwasannya dinyatakan dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap adanya kinerja pemerintahan (Fadilah, 2011).

Adanya profesionalisme dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa sangat diharapkan tujuan ekonomi maupun sosial pemerintahan desa nantinya dapat tercapai. Sehingga peran pihak diluar pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) seperti adanya tokoh desa, kaum petani, pengusaha desa, tokoh agama dan adanya perwakilan masyarakat yang saling bersinergi untuk dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Nantinya pengawasan mengenai pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ketat, profesional, terkontrol dan juga berintegritas (Prasetya & Abdul, 2015).

Fraud yang terjadi pada dasarnya disebabkan karena lemahnya pengendalian internal, tidak jujurnya pegawai dan tidak memiliki integritas serta model manajemen yang pernah melakukan tradisi kecurangan (Amrizal, 2004). Kompetensi aparatur yang memadai sangat diperlukan dalam rangka pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya kompetensi aparatur dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan desa, maka diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintah desa dapat terpenuhi. Agar dapat melakukan pencegahan *fraud* kompetensi aparatur harus bersinergi (Atmaja & Saputra, 2017).

Dengan memperhatikan pengendalian internalnya juga dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Suatu organisasi yang memiliki pengendalian internal yang baik akan dapat mendeteksi kecurangan. *Fraud* akan sulit dilakukan oleh pihak dalam maupun luar organisasi jika pengendalian internal yang ada cukup memadai. Pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mencegah timbulnya *fraud* dan dapat memberikan perlindungan bagi sebuah organisasi terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan harapan (Kaukab & Damayanti, 2015).

Bersumber pada latar balik diatas, hingga penulis tertarik buat melaksanakan riset yang bertajuk “*Internal Control System: Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Perspektif Fenemologi. Studi Fenomologi merupakan suatu sudut pandang yang fokus terhadap pengalaman-pengalaman suatu individu serta interpretasi dunia

Fokus pada Penelitian ini adalah memahami bagaimana Sistem Pengendalian Internal Dapat Mencegah *Fraud* pada Pengelolaan Keuangan Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena bertujuan untuk mengambil data nantinya. Ada beberapa teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data yang dimaksudkan oleh peneliti adalah untuk memperoleh informasi tentang relevansi data dari subjek penelitian dan untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data untuk survei ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara
2. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dimana dalam memperoleh data langsung dari pihak responden. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau suatu proses untuk memperoleh informasi dengan cara aktif bertanya dan menjawab pertanyaan melalui beberapa pertanyaan tatap muka antara pewawancara dan responden.
3. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dan mengetahui secara mendalam tentang Sistem Pengendalian Intern Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi bagaimana Sistem Pengendalian Intern dapat Mencegah *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Disini penulis memperoleh data langsung dari subjek penelitian melalui wawancara langsung dengan narasumber.
4. Dokumentasi
5. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber tertulis yang terdapat di lingkungan pemerintah daerah. Metode dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai dokumen-dokumen yang perlu dipelajari diantaranya sejarah desa, struktur organisasi, dan data tambahan yang dapat digunakan dalam penelitian di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
6. Observasi Langsung
7. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan penelitian secara langsung pada objek yang diteliti yaitu di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Teknik Analisis Data

Metode penelitian deskriptif analisis adalah menyajikan konsep teoritis dan penjelasan umum tentang apa yang sedang dipelajari. Analisis data dilakukan secara manual dan penulis menjelaskan atau menjelaskan, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi, pencegahan penipuan dalam pengelolaan keuangan Desa Karangsono, berdasarkan apa yang dia dengar selama wawancara dan apa yang dia lihat selama observasi. Adapun tahapan analisis data dalam analisis kualitatif ialah :

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti sebelum terjun ke lapangan mencari literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa Karangsono beroperasi dan mencatat semua data wawancara.
2. Mencatat hasil wawancara, yakni mencatat semua hasil wawancara agar tidak hilang. Sehingga peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Hubungan satu data dengan data yang lain perlu diklarifikasi, sehingga menghasilkan makna yang lebih jelas.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang telah disusun dengan rapi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau *flowchart*, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2016).
4. Pengambilan kesimpulan, Proses untuk menarik kesimpulan sudah dilakukan sejak awal terhadap suatu data yang diperoleh, tetapi kesimpulan sangat masih bersifat sementara atau masih diragukan. Namun dengan adanya menarik kesimpulan dan memverifikasi maka kesimpulan yang nantinya diambil lebih *grounded* (berbasis data lapangan). Kesimpulan seharusnya diverifikasi selama penelitian berlangsung dan kesimpulan yang diambil harus memiliki kesesuaian dan konsisten terhadap judul penelitian, rumusan masalah, isi dan analisis yang saling berhubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Perangkat Desa Karangsono, dari Tugas dan fungsi yang telah diuraikan diatas setiap individu telah melakukan Tugasnya dengan baik seperti yang disebutkan, namun ada beberapa faktor yang membuat terkendalanya tugas aparatur desa yakni faktor usia. Dimana hal tersebut terjadi pada Kasi Pelayanan yang mana usianya sudah tergolong lanjut dan sulit untuk memahami serta mempelajari media elektronik pada saat ini yaitu komputer, sehingga jika ada pelayanan yang memerlukan komputer Kasi Pelayanan dibantu dengan aparat desa yang lain untuk mengerjakan tugasnya. Dengan adanya kejadian seperti itu aparat desa karangsono saling membantu jika ada aparat lain yang membutuhkan bantuan dan tidak merasa terbebani satu sama lain.

Hasil analisis pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan. Kepala desa mengkoordinir dan menugaskan pegawai untuk melaksanakan tugasnya serta mengevaluasi peran dan tanggung jawab bawahannya secara berjenjang. Struktur organisasi dirancang sesuai dengan kompleksitas dan kebutuhan Pemerintah Desa Karangsono

Hasil analisis identifikasi risiko di Pemerintah Desa Karangsono berupa mengenali risiko-risiko dan bagaimana cara mengatasi melalui manajemen risiko dengan menggunakan metodologi yang sesuai aturan yang berlaku. Contohnya risiko dalam tahap perencanaan pembangunan dengan Dana Desa yaitu tidak ada sarana untuk penyampaian saran-saran pembangunan dari masyarakat maka dilaksanakannya kegiatan musrembangdes untuk menerima masukan dari masyarakat mengenai pembangunan desa. Selain itu pada tahap penggunaan Dana Desa yaitu risiko pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan infrastruktur seperti perbedaan volume material, kehilangan, dan bahan material yang tidak sesuai dengan kriteria pemesanan. Pada tahap pelaporan Dana Desa juga melakukan penilaian risiko dengan menetapkan transparansi kepada masyarakat.

Hasil analisis risiko. Pemerintah Desa Karangsono telah membentuk pengendalian internal untuk menganalisis risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan bersama dengan Dana Desa untuk memantau kemajuan kegiatan pembangunan. Kepala Desa Karangsono juga akan

mengambil langkah-langkah khusus untuk mengelola atau memitigasi risiko dan mencegah masalah dana desa.

Analisis yang akurat dan tepat waktu dari catatan transaksi insiden. Walikota Karangsono menginstruksikan kepada TPK dan Dirjen untuk mengelola Dana Desa, dan semua transaksi dan kejadian yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa pada tahun 2020 diklasifikasikan dan dilakukan dengan benar. Tanggung Jawab Sumber Daya dan Hasil Analisis Catatan. Kepala Desa Karangsono mengangkat staf atau manajer umum terkait untuk bertanggung jawab atas sumber daya dan mencatat, meninjau, dan melaporkan kegiatan setelah Program Pendanaan Desa dilaksanakan atau selesai.

Pelaksanaan Program Kegiatan Desa Karangsono 2020 yang didanai ADD tidak dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di desa Karangsono, rekening kas desa dan dana desa harus diadakan dan diatur oleh petugas keuangan desa karena kesalahan prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh walikota Karangsono, namun pada kenyataannya rekening kas desa dan dana desa yang dipegang oleh walikota desa dan petugas keuangan hanya akan membayar dan mencatat pemasukan dan pengeluaran yang terjadi.

Dengan adanya kesalahan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yang terjadi di desa Karangsono mengakibatkan sejumlah permasalahan diantaranya ialah tidak adanya transparansi keuangan desa yang mana seharusnya prinsip transparansi harus diterapkan sebaik-baiknya. Apabila prinsip transparansi tidak diterapkan dengan baik maka akan berimplikasi pada lingkungan desa seperti kesalahan pelaporan realisasi APBD, ketidaksesuaian hasil laporan realisasi dengan kenyataan yang ada di masyarakat, permasalahan penyaluran dana desa dan berpengaruh langsung terhadap partisipasi masyarakat pada periode berikutnya. Selain tidak adanya transparansi keuangan desa, hal lain yang disebabkan oleh kesalahan dalam Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Karangsono adalah tidak sesuainya mekanisme pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka bisa diketahui bahwa dalam tahap pelaksanaan Pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) didesa Karangsono belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan desa. Bendahara Kota wajib mencatat semua transaksi berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa menyimpan catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi yang telah terjadi.

Hasil analisis tindak lanjut. Pemerintah Desa Karangsono merekomendasikan hasil pembangunan infrastruktur desa untuk tahun selanjutnya. Kepala desa meminta kasun-kasun yang ada didesa Karangsono untuk mengajukan program-program pembangunan untuk memajukan Desa Karangsono.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa Aparat Desa, diperoleh hasil bahwa pemilihan Aparat Desa itu sudah sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki oleh Aparat Desa tersebut, hal ini sesuai dengan syarat yang di tentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Bab IV pasal 65 tentang Aparatur Desa tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Rivai (2011:198) bahwa penempatan pegawai dalam suatu organisasi harus memiliki kesesuaian antara kualifikasi atau latar belakang pendidikan pegawai dengan kualifikasi pekerjaan yang akan diembannya.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan tugas pokok, berdasarkan

hasil wawancara dengan Aparatur Desa, dapat diketahui bahwa rata-rata Aparatur Desa belum menguasai keterampilan tehnik yang dimaksud. Karna kurangnya pelatihan tentang Keterampilan Teknik Aparatur Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya perekrutan pendamping atau Operator di setiap Desa yang ada.

Berdasarkan data dari penelitian dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Desa, dapat diketahui bahwa Apartur Desa yang ada di Desa Karangsono mengetahui Keterampilan Administratif tapi belum sepenuhnya memahami itu di lihat dari hasil wawancara pemahaman-pemahaman yang di keluarkan setiap Aparatur Desa itu berbeda. Hal ini karna kurangnya pelatihan mengenai keterampilan administratif yang dilaksanakan. Adanya pelatihan dapat mempercepat meningkatkan keterampilan semua Aparatur Desa. Itu sesuai yang di kemukakan oleh Siagian (2003:47) bahwa keterampilan adalah kemampuan teknis untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang dapat di pelajari dan di kembangkan. Oleh karena itu peranan pelatihan adalah hal yang penting bagi setiap organisasi.

Berdasarkan dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan terkait masalah keamanan kenyamanan lingkungan kerja yang dirasakan oleh para Aparatur Desa di Desa karangsono. Kebanyakan Aparatur Desa sudah merasa nyaman dengan keamanan lingkungan kerja mereka sementara salah satu Aparatur Desa merasa kurang nyaman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidak efektifan pelayanan yang disediakan. Tapi rata-rata Aparatur Desa sudah merasa nyaman dan aman dalam mengerjakan pekerjaannya, seperti yang diungkapkan oleh Blum and Nylon (2008) yaitu rasa aman dan lingkungan yang terjaga akan menjamin dan menambah ketenangan dalam bekerja. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa keamanan lingkungan kerja yang di ciptakan para Aparatur Desa di Desa karangsono guna menunjang kenyamanan sudah cukup baik dalam mendukung sikap Aparatur Desa terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan ini mengidentifikasi bahwa kebutuhan pribadi yang berbeda pada setiap Aparatur Desa membuat tingkat kepuasan terhadap imbalan/gaji juga berbeda.

KESIMPULAN

Bagi hasil survei, sistem pengendalian intern efisien dalam menghindari penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Perihal ini sebab seluruh wujud kecurangan yang terjalin di zona keuangan sesuatu organisasi/ pemerintah bisa dicegah lewat sistem pengendalian internal yang baik. Keahlian fitur pengaruhi penangkalan penipuan manajemen keuangan kota. Di sini kompetensi manajemen desa memegang peranan berarti dalam mengelola keuangan desa buat menggapai tujuan bersama ialah tingkatkan kesejahteraan warga setempat lewat kenaikan ekonomi desa, sosial budaya, serta lain- lain. Pemerintah pusat mengawasi serta menarangkan pemakaian dana desa. Moral sudah sukses memitigasi efektifitas fitur serta sistem pengendalian intern terhadap penangkalan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak permasalahan penyelewengan dengan menyalahgunakan keahlian serta keahlian pengelolaan keuangan seorang, tetapi moralitas serta keahlian fitur yang tepat buat menghindari penyelewengan merupakan sama dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Amrizal. (2004). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. Jakarta: Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputy Bidang Investigasi.
- Aprillia, O., & Rafaela, P. (2015). The Effectiveness Of Fraud Triangle On Detecting Fraudulent Financial Statement: Using Beneish Model And The Case Of Special Companies. Jurnal

-
- Riset Akuntansi Dan Keuangan. 3 (3), 786-800.
- Ardiyanti, Anita , & Yudi Nur Supriadi. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance serta Implikasinya pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial*. Vol. 3. No. 1, 1-20.
- Atmaja, A., & Saputra, K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 1, 7-16.
- Basirruddin, M. (2014). Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2012. *Jom FISIP* 1, 2.
- Budi, W. (2008). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.
- Cressey, D. (1953). Other People's Money, Dalam: "Detecting And Predicting *Journal Of Corporate Governance*". 53-81.
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada SKDP Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No, 1, 86-100.
- Fadilah, S. (2011). Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal Dan Total Quality Management Terhadap Penerapan God Governance (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia) Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Hoi, C., & Robin , A. (2010). Labor Market Consequences of Accounting Fraud. *Corporate Governance : The International Journal of Business in Society*.
- Indrianto , N., & Supomo , B. (1998). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Junia, N., Rasuli, M., & Diyanto, V. (2016). Pengaruh Moralitas Aparat, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Kaukab, E., & Heny Damayanti. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian internal, Sistem Kompensasi, Moralitas Individu, dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus pada Koperasi di Wonosobo) . *Jurnal ilmiah Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol, 10 No. 1.
- Latan, H., & Selva Temalagi. (2012). *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Bandung : Alfabeta.
- Lokanan, M. E. (2015). Challenges To The Fraud Triangle: Question On Its Usefulness. *Elsivier Accounting Forum*-315, 24. 105-108.